

**PENGGALIAN POTENSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PEDESAAN PERKOTAAN UNTUK MENINGKATKAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN  
KARANGANYAR**



**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Mencapai Derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III Perpajakan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Oleh:**

**ALFIAN WAHYU PRASETYAWAN  
NIM F3411002**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA**

*community user*  
**2014**

## ABSTRAK

**PENGGALIAN POTENSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN  
PERKOTAAN UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI  
DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR****ALFIAN WAHYU PRASETYAWAN****NIM F34110002**

Permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini adalah pajak bumi dan bangunan memiliki resiko tidak dibayar lebih tinggi dibandingkan pajak lainnya, karena kurangnya fasilitas, sarana dan prasarana dalam pembayaran pajak tersebut.

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data, berupa observasi, wawancara, dokumentasi, dan kepustakaan. Sumber data adalah data primer dan sekunder dengan wawancara kepada pegawai di bidang penagihan DPPKAD Karanganyar dan dokumen dari DPPKAD Karanganyar.

Peneliti menemukan adanya kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang peneliti temukan yaitu DPPKAD Karanganyar melakukan persiapan yang baik dalam pengalihan PBB dari pusat ke daerah. Kelemahan yang peneliti temukan yaitu sarana dan prasarana yang minim sehingga menghambat pelaksanaan pendataan objek pajak, misalnya kendaraan untuk pegawai dalam melakukan pendataan di daerah terpencil.

Kesimpulan penelitian adalah DPPKAD melakukan persiapan yang baik dalam melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Terdapat peningkatan jumlah wajib pajak sebanyak 5017 orang dan kenaikan jumlah pendapatan PBB dari tahun 2013 ke tahun 2014 sebesar Rp.5.925.661.339.

Kata kunci: PBB, DPPKAD, WajibPajak.

**ABSTRACT****THE EXPLORATION OF POTENTIAL LAND AND BUILDING TAX IN  
RURAL AND URBAN AREAS TO IMPROVE THE LOCAL ORIGINAL  
INCOME OF KARANGANYAR REGENCY**

**ALFIAN WAHYU PRASETYAWAN**  
**NIM F34110002**

The problems of research was that land and building tax has higher risk of not being paid than other tax, because of limited facility, and infrastructure in the tax payment.

The author employed observation, interview, documentation, and library study as techniques of collecting data. The data source included primary and secondary one collected by interviewing the employees in tax collection division of DPPKAD Karanganyar and from the document of DPPKAD Karanganyar.

The author found the strength and weakness. The strength the author found was that the DPPKAD Karanganyar made a good preparation in transferring the PBB (Land and Building Tax) from the central to the local government. Meanwhile the weakness was limited infrastructure thereby inhibiting the implementation of text object registration, for example the vehicles for the employees in registering the remote area.

The conclusion of research was the DPPKAD had made a good preparation in conducting a variety of attempts in improving local original income. There was an increase in taxpayer number by 5017 people, and in amount of PBB income by IDR 5,925,661,339 from 2013 to 2014.

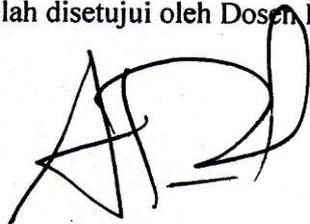
Keywords: PBB, DPPKAD, Taxpayers

## HALAMAN PERSETUJUAN

Laporan Tugas akhir dengan judul :

**PENGGALIAN POTENSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PEDESAAN PERKOTAAN UNTUK MENINGKATKAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN  
KARANGANYAR**

Surakarta, 8 Desember 2014  
Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing



AHMAD RIDWAN, S.E, AK  
NIP/ NIK/ NRP : 34070000

## HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir dengan Judul :

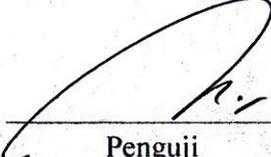
**PENGGALIAN POTENSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN  
PERKOTAAN UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI  
DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR**

Telah disahkan oleh Tim Penguji Tugas Akhir  
Program Studi Diploma III Perpajakan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Surakarta, 15 Desember 2014

Tim Penguji Tugas Akhir  
TRISNINIK RATIH W. S.E., Ak  
NIP: 1976 0404 2014 0901

AHMAD RIDWAN, S.E., Ak  
NRP: 340700001



---

Penguji



---

Pembimbing

## SURAT PERNYATAAN TUGAS AKHIR (TA)

Yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret:

Nama : ALFIAN WAHYU PRASETYAWAN  
NIM. : F3411002  
Program Studi : D3 Perpajakan  
Judul Tugas akhir : PENGGALIAN POTENSI PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN PEDESAAN PERKOTAAN UNTUK  
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa Tugas Akhir yang saya buat ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri dan bukan merupakan hasil jiplakan/ saduran dari karya orang lain.

Apabila ternyata dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa penarikan Ijasah dan penjabutan gelar sarjananya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Surakarta,  
Mahasiswa



ALFIAN WAHYU P  
NIM. F3411002

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**Hiduplah seakan esok engkau meninggal, belajarlaha seakan engkau hidup selamanya (Mahatma Gandhi)**

**Pendidikan adalah kekuatan utama yang bias kau gunakan untuk merubah dunia (Nelson Mandela)**

**Cara terbaik untuk menentukan masa depan adalah dengan menciptakannya (Abraham Lincoln)**

**Belajarlaha mengalah sampai tak seorangpun yang bisa mengalahkannya**



Karya ini dipersambahkan kepada:

1. Bapak Ibu saya tercinta.
2. Adik saya tersayang.
3. Bapak Ibu Dosen D3 Perpajakan  
UNS 2011.
4. Semua teman – teman ku.

*commit to user*

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikumwr.wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Laporan Tugas Akhir yang berjudul **Penggalian Potensi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar** dapat diselesaikan dengan baik.

Tugas akhir ini disusun guna untuk memenuhi syarat-syarat mencapai Gelar Ahli Madya pada Program Studi Diploma 3 Akuntansi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret.

Penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
2. Bapak Ibu yang selalu memberi dukungan dan semangat dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
3. Dr. WisnuUntoro, M.S selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret.
4. Drs. Hanung Triatmoko, M.Si., Ak selaku Ketua Program Studi Perpajakan pada Program Diploma 3 FEB UNS.
5. Bapak Ahmad Ridwan, S.E.,Ak selaku dosen pembimbing Tugas Akhir.

*commit to user*

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret yang telah member ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
7. Teman-teman perpajakan angkatan 2011.
8. Teman – temanku , Gendut, Bagus, Imam, serta Hafiedz yang membantu serta memberi motivasi dalam penyelesaian Tugas Akhir.
9. Ibu Christiani Nurendah W, SH, MM selaku Kabid Pendataan, Pengolahan dan Penetapan, dan Bapak Agung Joko Wiyarso, S.STP selaku Kasi Pendataan, Pengolahan dan Penetapan DPPKAD.
10. Mas Galuh, Mas Andi, Mas Udin, Mbak Dyan selaku karyawan bagian P3 DPPKAD Karanganyar yang telah menjadi rekan Magang serta teman sekaligus keluarga kecil yang memberi banyak pengalaman.
11. Semua pihak yang telah membantu namun tidak dapat disebutkan satu per satu.

Atas jasa-jasa dan dukungan dari mereka, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat bermanfaat bagi penulis. Sehingga laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Surakarta, 15 Desember 2014

Penulis

*commit to user*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
ABSTRACT.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
HALAMAN PENGASAHAN .....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Metode Penelitian .....	4
F. Metode Pengumpulan Data .....	6
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Pajak.....	8

*commit to user*

B. Pajak Daerah .....	11
C. Pajak Bumi dan Bangunan.....	14
<b>BAB III. PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Objek Penelitian .....	20
1. Sejarah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah .....	20
2. Tujuan, Visi dan Misi.....	21
3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi .....	22
4. Struktur Organisasi.....	35
B. Pembahasan Masalah.....	36
1. Upaya DPPKAD Kabupaten Karanganyar dalam meningkatkan penerimaan PAD di bidang pajak bumi dan bangunan .....	36
2. Peranan upaya tersebut dalam meningkatkan pendapatan asli daerah .....	39
C. Temuan.....	43
<b>BAB IV. PENUTUP.....</b>	<b>45</b>
A. Kesimpulan .....	45
B. Saran .....	45

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN

### DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 WP sebelum dan sesudah pendataan.....	39
3.2 Jumlah PBB sebelum dan sesudah jemput bola oleh DPPKAD.....	40
3.3 Efektivitas Pembinaan DPPKAD .....	41
3.4 Tanggapan WP .....	42



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3. 1 Struktur Organisasi DPPKAD Kabupaten Karanganyar .....	35



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Magang
2. Lembar Penilaian Magang
3. Data Pendapatan PBB Kabupaten Karanganyar 2013 dan 2014
4. Lembar Wawancara dengan pegawai DPPKAD Kabupaten Karanganyar



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama pembiayaan Negara dan pembangunan nasional. Menurut dari pemungutnya pajak terdiri dari Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat untuk membiayai rumah tangga Negara. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut Pemerintah Daerah untuk membiayai rumah tangga daerah. Pemungutan Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pemerintah Daerah akan memaksimalkan penerimaan-penerimaan daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemerintah Daerah Karanganyar pada saat ini mengelola 10 jenis pajak daerah. Jenis – jenis pajak daerah yang dikelola Pemerintah Daerah Karanganyar adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Bumi dan Bangunan.

Salah satu pajak yang berpengaruh besar pada Penerimaan Asli Daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan memiliki kontribusi sebesar 30% terhadap pendapatan asli daerah

*commit to user*

Kabupaten Karanganyar jika dibandingkan dengan penerimaan pajak yang lain. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan/pemanfaatan tanah dan atau bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan dapat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi terkait dengan bumi dan bangunan. Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan saat ini berdasarkan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Perda Kabupaten Karanganyar No.3 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan memiliki potensi yang yang besar dalam menambah penerimaan asli daerah dikarenakan obyek pajak ini adalah bumi dan bangunan yang jelas sebagian besar masyarakat memilikinya. Maka sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang diandalkan, penerimaan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan harus terus ditingkatkan.

Pasalnya pajak bumi dan bangunan memiliki resiko tidak dibayar lebih tinggi dibandingkan pajak lainnya, karena kurangnya fasilitas, sarana dan prasarana dalam pembayaran pajak tersebut. Di samping itu masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tata cara pembayaran pajak bumi dan bangunan. Selain juga kurang sadarnya masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan yang nominalnya bisa terbilang kecil, tetapi memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan asli daerah Kabupaten Karanganyar.

Melihat kemungkinan-kemungkinan risiko di atas DPPKAD Kabupaten Karanganyar berupaya lebih giat lagi dalam meningkatkan penerimaan di bidang pajak bumi dan bangunan. DPPKAD juga masih mencari langkah yang lebih efektif guna tercapainya penerimaan pendapatan asli daerah di bidang pajak bumi dan bangunan yang lebih maksimal.

Melihat latar belakang yang ada, maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian **“PENGALIAN POTENSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN PERKOTAAN UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah :

1. Bagaimana upaya DPPKAD Kabupaten Karanganyar dalam meningkatkan penerimaan PAD di bidang pajak bumi dan bangunan?
2. Seberapa besar peranan upaya tersebut dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Karanganyar?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukan penelitian ini ialah :

1. Mengetahui apa saja upaya yang dilakukan DPPKAD Kabupaten Karanganyar dalam meningkatkan pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan.

2. Untuk mengetahui seberapa besar peranan upaya tersebut dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Karanganyar.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Bermanfaat dalam menerapkan ilmu pengetahuan teoritis ke dalam kondisi nyata serta mendapatkan informasi, gambaran, dan pengalaman praktis dalam perpajakan terutama mengenai Pajak Daerah dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) itu sendiri.

2. Bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar

Dapat memberikan informasi, masukan, dan bahan pertimbangan apabila terdapat kelemahan atau kelebihan yang ditemukan, yang bisa meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karanganyar.

3. Bagi pihak lain

Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan sebagai referensi bagi peneliti lain yang melakukan penelitian serupa.

#### **E. Metode Penelitian**

1. Obyek Penelitian

Obyek dari penelitian ini adalah penggalian potensi pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan yang berpengaruh terhadap

penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2013-2014.

## 2. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data

1) Data kuantitatif adalah data yang dipaparkan dalam bentuk angka. Data dalam penelitian ini berupa angka-angka yang diperoleh dari DPPKAD Karanganyar.

2) Data kualitatif adalah data yang diwujudkan dalam bentuk kata-kata. Data dalam penelitian ini merupakan hasil wawancara antara penulis dengan informan dari DPPKAD Karanganyar.

### b. Sumber data

1) Asal sumber data:

#### a) Data Primer

Data primer yaitu teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian yang diperoleh dari sumber pertama dan biasanya belum diolah (Ketut, 2009).

#### b) Data Sekunder

Data yang didapat secara tidak langsung dari objek penelitian.

2) Sumber data diambil dari:

a) Informan, yaitu pegawai di bidang penagihan DPPKAD Karanganyar.

- b) Dokumen merupakan sumber data yang memiliki posisi penting dalam penelitian kualitatif. Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktivitas, tetapi juga berupa gambaran atau benda peninggalan yang berkaitan dengan suatu peristiwa tertentu.

#### **F. Metode Pengumpulan Data**

##### **1. Observasi**

Observasi yaitu peneliti mengamati secara langsung obyek yang sedang diteliti tersebut dan mencatatnya untuk mendapatkan informasi.

##### **2. Wawancara**

Wawancara adalah komunikasi dua arah untuk mendapatkan data dari narasumber. Wawancara dilakukan secara langsung antara peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan untuk memperoleh data yang dapat menjelaskan atau menjawab suatu permasalahan berkaitan dengan penelitian.

##### **3. Dokumentasi**

Metode dokumentasi merupakan pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan di bidang pengetahuan, pemberian atau pengumpulan bukti-bukti dan keterangan-keterangan. Penulis mengumpulkan data, laporan, dan tulisan dari DPPKAD Karanganyar yang mendukung teori dan penelitian.

#### 4. Kepustakaan

Serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian. Penulis melakukan dengan cara mempelajari buku-buku referensi yang berhubungan dengan penelitian dan penulisan tugas akhir.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pajak

##### 1. Pengertian Pajak

- a. Pajak menurut Rochmat Sumitro (1998) ialah iuran rakyat untuk kas negara berdasarkan Undang – undang dengan tidak mendapat imbal jasa yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
- b. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).
- c. Sedang pajak menurut pasal 1 UU No. 28 Tahun 2009 ialah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasar undang – undang, dengan tidak mendapat imbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

## 2. Fungsi Pajak (Mardiasmo, 2009:1)

Pajak merupakan sumber pendapatan Negara terbesar bagi pembangunan, oleh karena itu pajak memiliki banyak fungsi.

### a. Fungsi Penerimaan (*budgetair*)

Pajak merupakan salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk digunakan sebagai pembiayaan negara dan pengeluaran pembangunan.

### b. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pajak berfungsi untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan sosial guna mencapai tujuan – tujuan tertentu.

## 3. Asas Pemungutan Pajak

Asas – asas pemungutan pajak menurut (Waluyo, 2013) ialah sebagai berikut:

### a. Asas *Equality*

Pemungut pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak serta sesuai dengan manfaat yang diterima.

### b. Asas *Certainly*

Penetapan pajak tidak ditentukan sewenang – wenang tetapi harus berdasarkan Undang – undang, sehingga bagi yang melanggar akan dikenai sanksi hukum.

c. *Convenience of payment*

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi wajib pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan/keuntungan yang dikenakan pajak.

d. *Economic of collections*

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri.

4. Pengelompokan pajak menurut Mardiasmo (2009) terdiri dari tiga macam, yaitu pengelompokan pajak menurut golongannya, sifatnya, dan lembaga pemungut.

a. Pengelompokan pajak menurut golongannya terdiri dari:

- 1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
- 2) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

b. Pengelompokan pajak menurut sifatnya terdiri dari:

- 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.

- 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- c. Pengelompokan pajak menurut lembaga pemungut terdiri dari:
- 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan.
  - 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk dan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas dua macam, yaitu Pajak Provinsi (contoh: Pajak Kendaraan Bermotor) dan Pajak Kabupaten/ Kota. Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan lain-lain).

## B. Pajak Daerah

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-undang RI No. 28 Tahun 2009).

Adapun jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah antara lain:

1. Jenis-jenis Pajak Daerah

a. Pajak Propinsi, terdiri dari:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas air;
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
- 5) Pajak Rokok.

b. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:

- 1) Pajak Hiburan;
- 2) Pajak Reklame;
- 3) Pajak Penerangan Jalan;
- 4) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- 5) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 6) Pajak Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan;
- 7) Pajak Hotel;
- 8) Pajak Restoran;
- 9) Pajak Air Tanah;
- 10) Pajak Parkir;
- 11) Pajak Sarang Burung Walet.

## 2. Tata Cara Pemungutan Daerah

Pedoman tata cara pemungutan pajak daerah diatur Keputusan Menteri No.170 Tahun 1997 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 43 Tahun 1999 Tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah.

Kegiatan pendaftaran dan pendataan untuk wajib pajak baru dengan cara penetapan kepala daerah, terdiri dari:

- a) Pendaftaran;
- b) Pendataan;
- c) Formulir/kartu dan daftar.

Dalam pelaksanaannya, pemungutan Pajak Daerah tidak dapat diborongkan artinya seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada Wajib Pajak atau penghimpunan data objek dan subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang pengawasan penyeteroran pajak dan penagihan pajak.

Menurut uraian di atas telah dijelaskan Pajak Daerah secara umum yaitu pengertian Pajak Daerah, jenis-jenis Pajak Daerah dan tata cara pemungutan Pajak Daerah. Dari uraian di atas dapat

diketahui bahwa salah satu Pajak Daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan.

Pajak daerah dapat dikenakan kepada jenis pajak dengan ciri-ciri sebagai berikut (Darwin, 2010):

1. Objek pajak relatif tetap atau mobilitasnya rendah.
2. Objek pajak kurang sensitif terhadap perubahan pendapatan masyarakat.
3. Basis pengenaan pajaknya terdistribusi secara merata keseluruhan daerah.

Sumber-sumber pendapatan daerah (Darwin, 2010) dapat digolongkan menjadi empat bagian, yaitu:

1. Alokasi dari Pemerintah Pusat yang terdiri dari bagi hasil pajak, pinjaman dan penyertaan modal.
2. Perpajakan.
3. Retribusi.
4. Perusahaan.

### **C. Pajak Bumi dan Bangunan**

Pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Bentuk kebijakan tersebut dituangkan ke dalam

*commit to user*

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Adapun tujuan Pengalihan pengelolaan PBB-P2 menjadi pajak daerah sesuai dengan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah:

- a. meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah,
- b. memberikan peluang baru kepada daerah untuk mengenakan pungutan baru (menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah),
- c. memberikan kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi dengan memperluas basis pajak daerah,
- d. memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif pajak daerah, dan
- e. menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah.

Peralihan PBB perkotaan dan pedesaan dari pajak pusat menjadi pajak daerah yang diatur dalam UU 28 Tahun 2009, akan memberi dampak terhadap keuangan negara dan keuangan daerah. Pada prinsipnya secara administrasi terjadi perpindahan pencatatan hasil pemungutan PBB, jika sebelumnya penerimaan PBB tercatat pada keuangan negara (APBN) dalam penerimaan perpajakan, kemudian setelah mekanisme peralihan berjalan akan masuk dalam PAD khususnya pajak daerah.

## 1. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut pajak menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten atau kota. Adapun yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan pedalaman dan atau laut.

## 2. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan secara nyata:

- a. Mempunyai suatu hak atas bumi;
- b. Memperoleh manfaat atas bumi;
- c. Memiliki bangunan;
- d. Menguasai bangunan;
- e. Memperoleh manfaat atas bangunan.

## 3. Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Objek Pajak adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan,

kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:

- a. jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
- b. jalan tol;
- c. kolam renang;
- d. pagar mewah;
- e. tempat olahraga;
- f. galangan kapal, dermaga;
- g. taman mewah;
- h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
- i. menara.

Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak adalah objek pajak yang:

- a. Digunakan oleh Pemerintah dan/atau Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;

- d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
- f. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

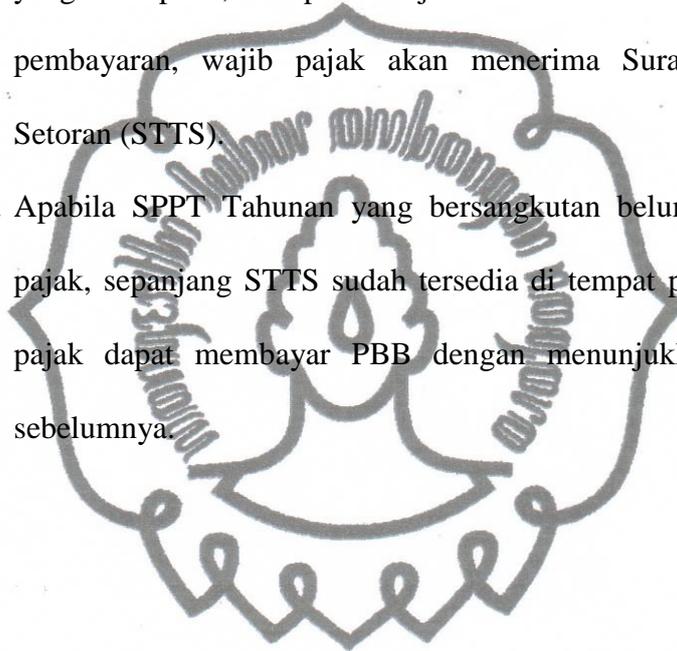
#### 4. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Tata cara pemungutan Pajak bumi dan Bangunan antara lain adalah:

- a. Dalam sistem tempat pembayaran, wajib pajak melunasi PBBnya tanpa diangsur pada tempat pembayaran yang telah ditetapkan. Namun ada wajib pajak yang dapat membayar melalui petugas pemungut dengan catatan tempat tinggal wajib pajak jauh atau sulit sarana dan prasarana dari tempat pembayaran yang ditunjuk.
- b. Untuk itu petugas pemungut menyetorkan ke Bank/Kantor Pos dan Giro tempat pembayaran. Wajib pajak kemudian menerima Tanda Terima Setara (TTS) sebagai tanda bukti penerimaan sementara dan STTS sebagai tanda bukti pembayaran PBB yang sah dari tempat pembayaran melalui petugas pemungut sebagai pengganti TTS.
- c. Wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban pembayaran PBB melalui prosedur pemindah bukuan/transfer, kiriman uang lewat Bank atau Wesel Pos.

Di atas telah diuraikan tentang tata laksana pembayaran, berikut akan dijelaskan terkait tentang pembayaran langsung ke tempat pembayaran:

- a. Bagi wajib pajak yang membayar langsung ketempat pembayaran yang ditetapkan, cukup menunjukkan SPPT PBB dan sebagai bukti pembayaran, wajib pajak akan menerima Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
- b. Apabila SPPT Tahunan yang bersangkutan belum diterima wajib pajak, sepanjang STTS sudah tersedia di tempat pembayaran wajib pajak dapat membayar PBB dengan menunjukkan SPPT tahun sebelumnya.



### BAB III

#### PEMBAHASAN

##### A. Gambaran Objek Penelitian

##### 1. Sejarah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

DPPKAD Kabupaten Karanganyar adalah salah satu dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang berkedudukan sebagai Dinas Daerah. DPPKAD dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar No. 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Karanganyar. Tugas-tugas DPPKAD yaitu melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah berdasar Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dalam bidang Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah meliputi :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretaris.
- c. Bidang Pendataan, Pengolahan dan Penetapan.
- d. Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan Pajak.
- e. Bidang Anggaran.
- f. Bidang Perbendaharaan dan Kas.
- g. Bidang Akuntansi.
- h. Bidang Aset Daerah.

## 2. Tujuan, Visi dan Misi.

Tujuan dari DPPKAD Kabupaten Karanganyar adalah menjadikan perencanaan anggaran keuangan daerah menjadi program yang prospektif dan realistis untuk dilaksanakan. Tujuan tersebut memiliki dua hal penting yang dapat membantu dalam pencapaiannya. Pertama, meningkatkan perbaikan terhadap mutu pelayanan dibidang keuangan daerah. Kedua, meningkatkan mutu pertanggung jawaban anggaran daerah sebagai suatu bentuk akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah yang transparan.

Visi DPPKAD adalah menjadikan dinas yang professional dan akuntabel dibidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Hal tersebut dapat tercapai dengan ditopang adanya profesionalisme SDM dibidang keuangan.

Misi DPPKAD adalah menjadikan aparatur yang professional dalam pengelolaan pendapatan dan belanja daerah. Ada empat hal yang menjadi landasan misi tersebut. Pertama, mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah. Kedua, mewujudkan Pelayanan Prima kepada masyarakat dibidang pendapatan, administrasi keuangan dan aset daerah. Ketiga, mewujudkan pengelolaan pendapatan daerah yang transparan, tertib dan akuntabel dalam rangka peningkatan pendapatan daerah. Dan yang terakhir, meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan SKPD terkait dalam rangka pengelolaan pendapatan, keuangan dan asset daerah.

### 3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi.

#### a. Kepala Dinas.

Tugas Kepala Dinas:

- 1) Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
- 2) Merumuskan program kegiatan dinas berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
- 3) Mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas.
- 4) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk Pengevaluasian permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal.
- 5) Melaksanakan otorisasi atas transaksi dan kejadian penting kegiatan APBD terhadap SKPD.

Fungsi Kepala Dinas:

- 1) Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi pendataan, pengolahan dan penetapan, penagihan, keberatan dan pemeriksaan pajak, anggaran, perbendaharaan dan kas daerah, akuntansi dan aset daerah serta kesekretariatan.

*commit to user*

- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, yang meliputi pendataan, pengolahan dan penetapan, penagihan, keberatan dan pemeriksaan pajak, anggaran, perbendaharaan dan kas daerah, akuntansi dan aset daerah serta kesekretariatan.
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi pendataan, pengolahan dan penetapan, penagihan, keberatan dan pemeriksaan pajak, anggaran, perbendaharaan dan kas daerah, akuntansi dan aset daerah serta kesekretariatan.
- 4) Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dalam lingkup Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris.

Tugas Sekretaris:

- 1) Membantu kepala dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan perencanaan, keuangan, umum, dan kepegawaian di lingkungan dinas.
- 2) Merumuskan program kegiatan sekretariat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.

*commit to user*

- 3) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Fungsi Sekretaris:

- 1) Melaksanakan koordinasi dengan kepala bidang di lingkungan dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal.
- 2) Merumuskan konsep kebijakan kepala dinas sesuai bidang tugas di sekretariat.
- 3) Merumuskan program kegiatan dinas berdasarkan hasil rangkuman rencana kegiatan bidang-bidang.

Sekretariat terdiri dari:

- 1) Kepala Sub Bagian Perencanaan.

Kepala sub bagian perencanaan mempunyai tugas membantu sekretaris dalam menyusun program kegiatan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan dinas.

- 2) Kepala Sub Bagian Keuangan.

Kepala sub bagian keuangan mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan urusan administrasi keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan dinas.

*commit to user*

3) Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian.

Kepala sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum, rumah tangga, perlengkapan/perbekalan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan, serta pengelolaan administrasi kepegawaian dinas.

c. Bidang Pendataan, Pengolahan dan Penetapan.

Tugas Bidang Pendataan, Pengolahan dan Penetapan:

- 1) Membantu kepala dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan di bidang pendataan, pengolahan dan penetapan.
- 2) Merumuskan program kegiatan bidang pendataan, pengolahan dan penetapan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
- 3) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Fungsi Bidang Pendataan, Pengolahan dan Penetapan:

- 1) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan.

- 2) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
- 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pendataan, Pengolahan dan Penetapan terdiri dari:

- 1) Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan.

Kepala seksi pendaftaran dan pendataan mempunyai tugas membantu kepala bidang pendataan, pengolahan dan penetapan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan seksi pendaftaran dan pendataan.

- 2) Kepala Seksi Pengolahan Data, Intensifikasi dan Ekstensifikasi.

Kepala seksi pengolahan data, intensifikasi dan ekstensifikasi mempunyai tugas membantu kepala bidang pendataan, pengolahan dan penetapan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan seksi pengolahan data, intensifikasi dan ekstensifikasi.

- 3) Kepala Seksi Penetapan.

Kepala seksi penetapan mempunyai tugas membantu kepala bidang pendataan, pengolahan dan penetapan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan seksi penetapan.

*commit to user*

d. Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan Pajak.

Tugas Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan Pajak:

- 1) Membantu kepala dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di bidang penagihan, keberatan dan pemeriksaan pajak.
- 2) Merumuskan program kegiatan di bidang penagihan, keberatan dan pemeriksaan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
- 3) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Fungsi Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan Pajak:

- 1) Melaksanakan penagihan pajak daerah yang telah ditetapkan serta pajak daerah melampaui jatuh tempo sesuai peraturan yang berlaku agar pembayaran pajak daerah tertib dan lancar.
- 2) Menghimpun laporan kegiatan program penagihan dengan rekapitulasi laporan yang masuk sebagai bahan penyempurnaan dan perencanaan yang akan datang.
- 3) Melaksanakan pelayanan terhadap keberatan dan permohonan banding dari WP daerah sesuai peraturan yang berlaku.

Bidang Penagihan, Keberatan dan Pemeriksaan Pajak terdiri dari:

1) Kepala Seksi Penagihan.

Kepala seksi penagihan mempunyai tugas membantu kepala bidang penagihan, keberatan dan pemeriksaan pajak dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan seksi penagihan.

2) Kepala Seksi Keberatan dan Banding.

Kepala seksi keberatan dan banding mempunyai tugas membantu kepala bidang penagihan, keberatan dan pemeriksaan pajak dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan seksi keberatan dan banding.

3) Kepala Seksi Pemeriksaan Pajak.

Kepala seksi pemeriksaan pajak mempunyai tugas membantu kepala bidang penagihan, keberatan dan pemeriksaan pajak dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan seksi pemeriksaan pajak.

e. Bidang Anggaran.

Tugas Bidang Anggaran:

- 1) Membantu kepala dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan di bidang anggaran.

- 2) Merumuskan program kegiatan di bidang anggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
- 3) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Fungsi Bidang Anggaran:

- 1) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
- 2) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
- 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Anggaran terdiri dari:

- 1) Kepala Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran.

Kepala seksi perencanaan dan penyusunan anggaran mempunyai tugas membantu kepala bidang anggaran dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan seksi perencanaan dan penyusunan anggaran.

- 2) Kepala Seksi Pengendalian Anggaran.

Kepala seksi pengendalian anggaran mempunyai tugas membantu kepala bidang anggaran dalam melaksanakan penyiapan bahan

*commit to user*

perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan seksi pengendalian anggaran.

f. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah.

Tugas Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah:

- 1) Membantu kepala dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di bidang perbendaharaan dan kas daerah.
- 2) Merumuskan program kegiatan bidang perbendaharaan dan kas daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
- 3) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah:

- 1) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
- 2) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
- 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah terdiri dari:

1) Kepala Seksi Perbendaharaan.

Kepala seksi perbendaharaan mempunyai tugas membantu kepala bidang perbendaharaan dan kas daerah dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan seksi perbendaharaan.

2) Kepala Seksi Kas Daerah.

Kepala seksi kas daerah mempunyai tugas membantu kepala bidang perbendaharaan dan kas daerah dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan seksi kas daerah.

g. Bidang Akuntansi.

Tugas Bidang Akuntansi:

- 1) Membantu kepala dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di bidang akuntansi.
- 2) Merumuskan program kegiatan akuntansi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
- 3) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

*commit to user*

#### Fungsi Bidang Akuntansi:

- 1) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
- 2) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
- 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bidang Akuntansi terdiri dari:

- 1) Kepala Seksi Pembukuan, Pelaporan dan Informasi Keuangan.  
Kepala seksi pembukuan, pelaporan dan informasi keuangan mempunyai tugas membantu kepala bidang akuntansi dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan seksi pembukuan, pelaporan dan informasi keuangan.
- 2) Kepala Seksi Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan.  
Kepala seksi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan mempunyai tugas membantu kepala bidang akuntansi dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan seksi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.

#### h. Bidang Aset Daerah.

Tugas Bidang Aset Daerah:

- 1) Membantu kepala dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di bidang aset daerah.
- 2) Merumuskan program kegiatan aset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
- 3) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Fungsi Bidang Aset Daerah:

- 1) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
- 2) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
- 3) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Aset Daerah terdiri dari:

- 1) Kepala Seksi Pengendalian dan Analisa Aset Daerah.

Kepala seksi pengendalian dan analisa aset daerah mempunyai tugas membantu kepala bidang aset daerah dalam melaksanakan penyiapan

*commit to user*

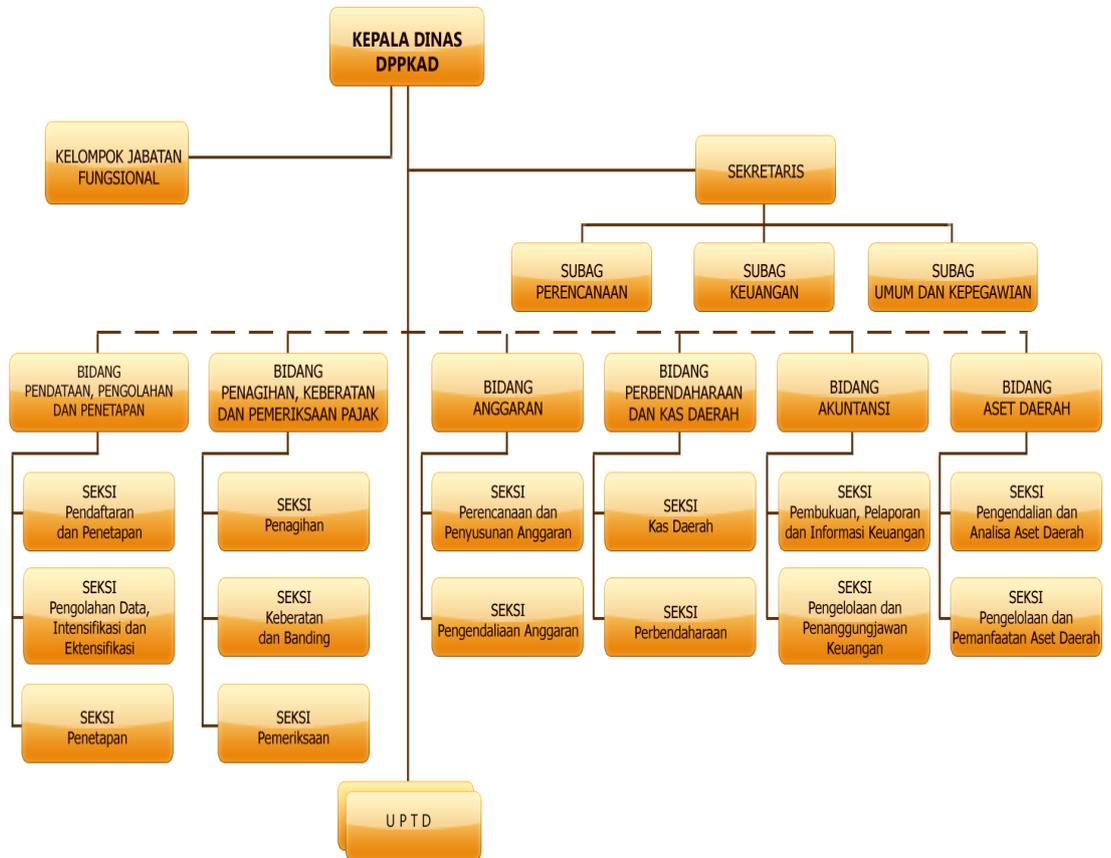
bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan seksi pengendalian dan analisa aset daerah.

2) Kepala Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Daerah.

Kepala seksi pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah mempunyai tugas membantu kepala bidang aset daerah dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan seksi pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah.



4. Srtuktur Organisasi



**Gambar 3. 1**  
**Struktur Organisasi DPPKAD Kabupaten Karanganyar**  
*Sumber : DPPKAD Kabupaten Karanganyar*

*commit to user*

## B. Pembahasan

1. Upaya DPPKAD Kabupaten Karanganyar dalam meningkatkan penerimaan PAD di bidang pajak bumi dan bangunan.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 maka prosedur pemungutan PBB dimulai dari pendataan. Pendataan dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), kemudian SPOP diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Kepala Daerah. Berdasarkan SPOP tersebut, kepala daerah menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT). Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak paling lama enam bulan sejak tanggal diterimanya SPPT. Pembayaran dapat dilakukan di bank persepsi atau petugas pemungut seperti kepala dusun atau orang yang ditunjuk oleh pihak kelurahan. Dalam meningkatkan PAD dari potensi pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Karanganyar, adapun langkah langkah yang ditempuh DPPKAD adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pendataan secara aktif dan pasif.

Pendataan aktif ialah kegiatan pendataan untuk mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan obyek dan subyek PBB P-2 dengan cara melibatkan pihak desa/kelurahan atau mendatangi secara langsung wajib pajak.

Pihak Terkait:

1) DPPKAD

DPPKAD sebagai tim pelaksana pendataan mengumpulkan data obyek dan subyek pajak dengan cara menyampaikan SPOP dan LSPOP baik secara perorangan atau kolektif kepada Desa/Kelurahan atau langsung kepada wajib pajak dan memantau dalam pengembalian SPOP dan LSPOP termasuk dalam hal pemutakhiran data PBB P-2. Dan meminta dokumen pendukung terkait obyek dan subyek pajak.

2) Desa/Kelurahan

Desa/Kelurahan menerima SPOP dan LSPOP secara perorangan atau kolektif dan untuk sebagai sarana pendukung pendataan terhadap wajib pajak dan mengembalikan kepada tim pelaksana pendataan dari DPPKAD.

3) Wajib Pajak

Wajib pajak menerima SPOP dan LSPOP dari tim pelaksana pendataan DPPKAD atau dari pihak Desa/Kelurahan mengisi secara benar, jelas dan menandatangani SPOP dan LSPOP dan mengembalikan ke tim pelaksana pendataan DPPKAD atau pihak Desa/Kelurahan. Dan memberikan dokumen pendukung terkait obyek dan subyek pajak.

*commit to user*

Dokumen yang digunakan ialah:

- 1) SPOP (Surat Pemberitahuan Obyek Pajak) adalah formulir yang berkaitan dengan informasi tambahan untuk data baru, data letak obyek pajak, data subyek pajak dan data tanah.
- 2) LSPOP (Lampiran Surat Pemberitahuan Obyek Pajak) ialah formulir yang berkaitan dengan rincian data bangunan, fasilitas dan data tambahan untuk dokumen.
- 3) Data Pendukung: data pendukung meliputi fotokopi identitas wajib pajak, fotokopi SPPT dan STTS, fotokopi bukti surat tanah, dan surat kuas dalam hal dikuasakan pihak lain.

Pendataan pasif ialah kegiatan pendataan untuk mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan obyek dan subyek PBB P-2 dengan cara wajib pajak datang secara langsung atau melalui pihak desa/kelurahan ke kantor DPPKAD guna pengajuan permohonan pendataan/pemutakhiran data yang berkaitan dengan pembetulan, mutasi, pembatalan, pendaftaran obyek baru dan pengajuan salinan, baik secara perorangan atau kolektif.

- b. Mengadakan kegiatan jemput bola di wilayah yang dinilai rendah secara prosentase penerimaan PBB.

Kegiatan jemput bola adalah mencari pelanggan dengan cara apapun yang efektif tanpa harus mengeluarkan banyak tenaga, fungsinya untuk lebih mendekatkan diri dengan Wajib Pajak.

*commit to user*

- c. Mengadakan kegiatan pembinaan wilayah pungutan PBB untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak.

Kegiatan pembinaan terhadap wajib pajak biasa dilakukan di kantor Kelurahan/Desa secara berkala guna meningkatkan kesadaran masyarakat agar mau membayar pajak khususnya pajak bumi dan bangunan.

- d. Memberikan penghargaan berupa hadiah kepada wajib pajak yang beruntung yang telah melaksanakan kewajiban membayar pajaknya.

DPPKAD memberikan penghargaan berupa souvenir kepada wajib pajak yang tertib membayar pajak yang diberikan satu tahun sekali. Hal ini dilakukan DPPKAD guna memberi stimulasi kepada wajib pajak lainnya agar tertib membayar pajak.

2. Peranan upaya tersebut dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Karanganyar.

- a. Pendataan secara aktif dan pasif.

**Tabel 3.1**  
**WP sebelum dan sesudah pendataan.**

2013	2014	Kenaikan	
402.062	407.079	5017	1,25%

Pada tahun 2013 jumlah WP sebesar 402.062 meningkat di tahun 2014 menjadi 407.079. Terdapat kenaikan sebesar 1,25% yaitu 5017 WP dari tahun 2013 ke 2014. Kenaikan tersebut membuktikan bahwa usaha DPPKAD dengan pendataan aktif dan pasif cukup berhasil, terbukti terdapat kenaikan dari tahun 2013 ke tahun 2014.

*commit to user*

- b. Kegiatan jemput bola di wilayah yang dinilai rendah secara prosentase penerimaan PBB.

**Tabel 3.2**  
**Jumlah PBB sebelum dan sesudah jemput bola oleh DPPKAD**

Sebelum jemput bola			Kenaikan	
Tahun	Target	Realisasi	Rupiah	%
2011	18.100.000.000	18.201.372.312	(1.147.004.725)	6%
2012	18.100.000.000	16.952.995.275		
Sesudah jemput bola				
2013	20.100.000.000	22.685.594.812	5.925.661.339	26%
2014	22.100.000.000	28.025.261.339		

Jumlah PBB yang di terima sebelum jemput bola pada tahun 2011 telah memenuhi target, dan mengalami peningkatan sebesar Rp.101.372.312, tetapi pada tahun 2012 penerimaan yang diterima tidak memenuhi target yang diharapkan. Pada tahun 2012 dari target yang ditetapkan sebesar Rp 18.100.000.000, hanya dapat terpenuhi sebesar Rp.16.952.995.275 dan memiliki selisih sebesar Rp.1.147.004.725.

Sesudah dilakukannya jemput bola oleh DPPKAD, PBB yang diterima mengalami kenaikan, pada tahun 2013 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 20.100.000.000, pendapatan yang diperoleh mencapai Rp.22.685.594.812. Pada tahun 2014 pendapatan yang diperoleh DPPKAD jauh lebih meningkat dibanding tahun sebelumnya, walaupun terdapat kenaikan target menjadi 22.100.000.000, DPPKAD berhasil mencapai target dan memiliki pendapatan lebih besar Rp.5.925.661.339 dari target yang ditetapkan.

Hal ini membuktikan bahwa kegiatan jempit bola yang dilakukan oleh DPPKAD cukup efektif meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya di bidang PBB.

- c. Mengadakan kegiatan pembinaan wilayah pungutan PBB untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak.

**Tabel 3.3**  
**Efektivitas pembinaan DPPKAD**

Tahun	Jumlah WP	Pendapatan PBB
2013	402.061	22.685.594.812
2014	407.078	28.025.261.339

Kegiatan pembinaan dilakukan DPPKAD pada tahun 2014. Pihak DPPKAD rutin melakukan pembinaan dari satu kelurahan ke kelurahan yang lain. Terbukti adanya peningkatan jumlah wajib pajak dan jumlah pendapatan PBB yang diterima. Dari kenaikan WP sebanyak 5017 orang DPPKAD mampu meningkatkan jumlah pendapatan PBB sebesar Rp.5.925.661.339. Hal tersebut membuktikan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh DPPKAD berjalan sesuai yang diharapkan.

- d. Memberikan *reward* berupa hadiah kepada wajib pajak yang beruntung yang telah melaksanakan kewajiban membayar pajaknya sebelum jatuh tempo.

Untuk membuktikan seberapa besar peranan upaya ini, penulis melakukan wawancara terhadap sejumlah WP. Penulis mengambil sebanyak 100 WP dan hasilnya sebagai berikut:

*commit to user*

**Tabel 3.4**  
**Tanggapan WP**

Jumlah WP	Keterangan
74	Antusias
15	Biasa saja
11	Tidak tertarik

Dari 100 sampel yang saya ambil, 74 WP mengaku antusias dengan adanya penghargaan yang di berikan oleh DPPKAD bagi 100 WP pembayar pajak pertama, sedangkan 15 WP mengaku biasa saja akan adanya pemberian hadiah oleh DPPKAD, dan sisanya tidak tertarik sama sekali dengan adanya hal tersebut. Hal ini menunjukan langkah yang dilakukan DPPKAD dapat menstimulasi kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak.

## C. TEMUAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas, dapat ditemukan adanya kelebihan dan kelemahan dalam pelaksanaan pemungutan PBB Pedesaan Perkotaan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar. Adapun kelebihan dan kelemahannya adalah sebagai berikut:

### 1. Kelebihan

Berdasarkan pembahasan tentang pemungutan pajak bumi bangunan sektor pedesaan dan perkotaan pada DPPKAD Karanganyar ditemukan kelebihan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar melakukan persiapan yang baik dalam pengalihan PBB dari pusat ke daerah. Misal, memberikan penyuluhan/sosialisasi kepada pegawai DPPKAD guna melakukan tugas dengan semaksimal mungkin mengingat PBB sudah menjadi wewenang Pemerintah Daerah khususnya di DPPKAD
- b. Melakukan upaya agar pendapatan asli daerah khususnya PBB dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Misal, melakukan kegiatan pembinaan ke pelosok desa yang mungkin tidak pernah dijangkau di saat PBB masih menjadi wewenang Pemerintah Pusat.
- c. Terdapat peningkatan jumlah WP sebesar 5017 orang.
- d. Terdapat peningkatan jumlah pendapatan PBB sebesar Rp.5.925.661.339.

*commit to user*

## 2. Kelemahan

Berdasarkan pembahasan tentang pemungutan pajak bumi bangunan sektor perdesaan dan perkotaan pada DPPKAD Karanganyar ditemukan kelemahan sebagai berikut:

- a. Kurangnya jumlah orang yang dimiliki pihak DPPKAD, sehingga kurang optimalnya upaya yang dilakukan DPPKAD. Sehingga waktu yang dibutuhkan lebih lama. Mungkin dengan ditambahkan jumlah personil sosialisasi di daerah desa terpencil bisa dilakukan lebih dari satu kali dan menambah jumlah wajib pajak yang mengikuti sosialisasi tersebut.
- b. Sarana dan prasarana yang minim sehingga menghambat pelaksanaan pendataan objek pajak, misalnya kendaraan untuk pegawai dalam melakukan pendataan di daerah terpencil. DPPKAD perlu menambah jumlah kendaraan khususnya pada sepeda motor untuk menjangkau wilayah terpencil yang sulit dijangkau oleh mobil.
- c. Membutuhkan anggaran yang cukup besar mengingat letak objek pajak yang sulit dijangkau. DPPKAD perlu membuat anggaran khusus untuk melakukan upaya-upaya tersebut selain anggaran yang sudah dibuat.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang pemungutan pajak bumi bangunan sektor perdesaan dan perkotaan pada DPPKAD Karanganyar peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat peningkatan jumlah WP sebanyak 5017 orang dan kenaikan jumlah pendapatan PBB dari tahun 2013 ke tahun 2014 sebesar Rp.5.925.661.339.
2. Dari survey yang dilakukan penulis, 74 WP mengaku antusias dengan upaya DPPKAD dalam memberikan hadiah kepada WP yang termasuk dalam 100 WP pembayar pajak pertama.
3. DPPKAD melakukan persiapan yang baik dalam melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

#### B. Saran

Berdasarkan pembahasan tentang pemungutan pajak bumi bangunan sektor perdesaan dan perkotaan pada DPPKAD Karanganyar peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Menambah anggota guna melakukan upaya peningkatan pendapatan asli daerah.
2. Menambah alat transportasi yang digunakan untuk melakukan pendataan objek pajak di daerah terpencil.

*commit to user*

3. Pemerintah daerah diharapkan membuat anggaran khusus untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan asli daerah. Misalnya, anggaran untuk sosialisasi di desa-desa.



**DAFTAR PUSTAKA**

Darwin. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Mitra Wacana Media: Jakarta.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 170/KMK 43/1999 *tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah..*

Ketut. 2009. *Statistik, Demografi, Teknologi, Informasi dan Bisnis Online*. Badan Penelitian Pusat Statistika: Bali.

Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2011. CV Andi Offset: Yogyakarta

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 tahun 2009, *tentang Organisasidan Tata Kerja Daerah Kabupaten Karanganyar.*

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 tahun 2012, *tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.*

Republik Indonesia. 2009. Undang-undang Nomor 16 tahun 2009, *tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*

Republik Indonesia. 2009. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009, *tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).*

Sumitro, Rochmat. 1998. *Asas dan Dasar Perpajakan 1*, PT. Refika Aditama: Bandung.

Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 8. Salemba Empat: Jakarta



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
FAKULTAS EKONOMI  
**INTERNSHIP & CAREER DEVELOPMENT**

Jalan Ir. Sutami No. 36 A Kentingan Surakarta 57126  
Telepon (0271) 655452 Faximile (0271) 655452 http://www.fe.uns.ac.id

No : 160/UN27.04.9/ICD/III/2013  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Ijin Magang

30 September 2013

Yth. Kepala KPP Pratama Karanganyar  
Karanganyar

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa salah satu program bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret dalam rangka memperoleh pengalaman di lapangan adalah **Kuliah Magang Kerja** di lembaga/perusahaan yang sesuai dengan bidang studi masing-masing. Program tersebut juga dimaksudkan untuk membekali mahasiswa agar siap berkompetisi di pasar kerja setelah mereka lulus kuliah.

Sehubungan dengan hal itu, kami mohon bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu menerima 3 (tiga) orang mahasiswa untuk melaksanakan pemagangan kerja selama kurang lebih 1 (satu) bulan pada bulan Januari 2014 – Februari 2014 di lembaga/perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin.

Adapun daftar nama mahasiswa yang akan mengikuti kuliah magang kerja tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Nama	NIM	Jurusan/Program Studi
1.	ALFIAN WAHYU P	F3411002	Perpajakan / D3
2.	ANINDITA DEWINTA P	F3411008	Perpajakan / D3
3.	LUTHFIANA NIA SARI	F3411062	Perpajakan / D3

Sebagai pertimbangan, perlu kami sampaikan bahwa kegiatan magang kerja ini hanya untuk kepentingan keilmuan, sehingga hasil dan laporan magang kerja tidak akan kami publikasikan ke pihak lain.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas kerjasama Bapak/ Ibu kami ucapkan terimakasih.

Ketua Internship &  
Career Development  
Fakultas Ekonomi UNS

  
A. H. Wibawa, SE, MSi, Ak  
NIP. 19730215 200012 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH**

Jl. KH. Wachid Hasyim No. 2 Telp. (0271) 495066, 495138 Fax. (0271) 6491366 Karanganyar 57713

**SURAT KETERANGAN**

No. \_\_\_\_\_

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agung J. Wiyarso S.STP, MM  
Jabatan : Kepala Seksi Penetapan

Menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Alfian Wahyu P  
NIM : F3411002  
Program : Diploma  
Jurusan/Progdi : D3 Akuntansi Perpajakan

Telah melaksanakan Kuliah Magang Kerja dari tanggal 15 Januari 2014 sd 15 Februari 2014 dengan nilai sebagai berikut :

No	Aspek Penilaian	Bobot (a)	Skor (b)	(a)x(b)
1	Etika & Kedisiplinan	10%	97	
2	Kemampuan Berkomunikasi & Bekerjasama	20%	95	
3	Kemandirian	20%	94	
4	Kreatifitas	10%	94	
5	Kemampuan Menyelesaikan Pekerjaan di Bidangnyanya	20%	97	
6	Kemampuan Mengidentifikasi & Memecahkan Masalah	20%	97	
	<b>Jumlah</b>	<b>100%</b>	<b>95,67</b>	

Keterangan :

Nilai Standar 100	Nilai Standar 4	Nilai Huruf
0 - 39	0	E
40 - 59	1	D
60 - 69	2	C
70 - 79	3	B
80 - 100	4	A

Karanganyar ,      Februari 2014

Mengetahui,  
Kepala Bidang Pendaftaran  
Pendataan, Pengolahan Data dan Penetapan

**CHRISTIANI NURENDAH WIDYAWATI, SH.MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19630427 199003 2 002

Kepala Seksi Penetapan

**AGUNG JOKO WIYARSO, S.STP, MM**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19780819 199711 1 001

DATA PENERIMAAN PBB DPPKAD KARANGANYAR 2013			
NO	KECAMATAN	JUMLAH WP	NOMINAL
1	JATIPURO	16,257	405,681,114
2	JATİYOSO	22,567	373,124,928
3	JUMAPOLO	21,347	537,530,992
4	JUMANTONO	27,095	309,374,374
5	MATESIH	18,569	474,350,589
6	TAWANGMANGU	20,759	1,058,389,630
7	NGARGOYOSO	18,464	263,053,267
8	KARANGPANDAN	21,321	785,854,728
9	KARANGANYAR	30,432	2,154,758,128
10	TASIKMADU	23,334	1,032,673,027
11	JATEN	26,347	5,965,543,378
12	COLOMADU	28,572	5,179,565,834
13	GONDANGREJO	38,785	1,473,658,003
14	KEBAKKRAMAT	26,507	1,583,345,250
15	MOJOGEDANG	28,858	561,654,210
16	KERJO	15,941	324,675,800
17	JENAWI	16,906	202,361,560
TOTAL			22,685,594,812

**DATA PENERIMAAN PBB DPPKAD KARANGANYAR 2014**

NO	KECAMATAN	JUMLAH WP	NOMINAL
1	JATIPURO	16,532	445,443,589
2	JATIYOSO	22,816	420,198,787
3	JUMAPOLO	21,461	603,817,568
4	JUMANTONO	27,324	399,381,319
5	MATESIH	18,723	526,313,753
6	TAWANGMANGU	21,085	1,300,595,594
7	NGARGOYOSO	18,699	300,803,567
8	KARANGPANDAN	21,427	897,884,921
9	KARANGANYAR	30,921	2,761,345,688
10	TASIKMADU	23,693	1,494,910,765
11	JATEN	27,090	6,769,906,385
12	COLOMADU	28,790	5,960,793,535
13	GONDANGREJO	39,264	2,215,477,296
14	KEBAKKRAMAT	26,719	2,680,730,009
15	MOJOGEDANG	29,261	662,784,325
16	KERJO	16,107	357,745,785
17	JENAWI	17,166	227,128,453
<b>TOTAL</b>			<b>28,025,261,339</b>

## DATA PENERIMAAN PBB 2014

JATIPURO			
NO	NAMA	NOMINAL	JUMLAH WP
1	NGEPUNGSARI	45.094.629	1.951
2	JATIPURWO	57.850.131	1.836
3	JATIPURO	59.871.070	1.704
4	JATISOBO	54.491.991	1.955
5	JATIWARNO	48.638.125	1.653
6	JATIMULYO	40.629.604	1.488
7	JATISOKO	28.376.362	1.395
8	JATIHARJO	34.935.282	1.110
9	JATIKUWUNG	36.614.748	1.421
10	JATIROYO	38.941.647	2.019
		445.443.589	16.532

JATIYOSO			
NO	NAMA	NOMINAL	JUMLAH WP
001	JATISAWIT	55.707.763	1.733
002	PETUNG	43.465.257	1.875
003	WONOKELING	45.963.794	2.088
004	JATIYOSO	62.019.452	2.453
005	TLOBO	35.609.651	2.055
006	WONOREJO	50.284.462	3.885
007	BERUK	37.117.194	2.719
008	KARANGSARI	39.504.169	2.890
009	WUKIRSAWIT	50.527.045	3.118
		420.198.787	22.816

JUMAPOLO			
NO	NAMA	NOMINAL	JUMLAH WP
001	PASEBAN	31.906.450	1.410
002	LEMAHBANG	59.086.055	1.590
003	KARANGBANGUN	49.393.108	1.480
004	PLOSO	42.726.369	1.468
005	GIRIWONDO	49.373.601	1.592
006	KADIPIRO	56.554.691	1.747
007	JUMANTORO	48.163.952	2.255
008	KEDAWUNG	45.035.046	1.556
009	BAKALAN	42.606.663	1.722
010	JUMAPOLO	67.824.479	2.541
011	KWANGSAN	51.285.991	1.960
012	JATIREJO	59.861.163	2.140
		603.817.568	21.461

JUMANTONO			
NO	NAMA	NOMINAL	JUMLAH WP
001	SEDAYU	40.548.117	2.618
002	KEBAK	35.877.512	2.562
003	GEMANTAR	23.361.985	2.164
004	TUNGGULREJO	38.914.460	2.821
005	GENENGAN	41.688.781	3.010
006	NGUNUT	59.843.575	2.567
007	TUGU	33.822.766	3.021
008	SUKOSARI	33.535.922	1.366
009	SAMBIREJO	29.392.231	1.998
010	BLORONG	28.841.818	2.456
011	SRINGIN	33.554.152	2.741
		399.381.319	27.324

MATESIH			
NO	NAMA	NOMINAL	JUMLAH WP
001	NGADILUWIH	58.774.746	2.359
002	DAWUNG	58.487.352	1.954
003	MATESIH	92.638.616	2.899
004	KORIPAN	38.651.164	1.873
005	KARANGBANGUN	63.327.128	2.037
006	GIRILAYU	47.442.593	1.851
007	PABLENGAN	49.406.196	2.033
008	PLOSOREJO	76.913.721	2.443
009	GANTIWARNO	40.672.237	1.274
		526.313.753	18.723

TAWANGMANGU			
NO	NAMA	NOMINAL	JUMLAH WP
001	BANDARDAWUNG	66.439.583	1.974
002	SEPANJANG	57.150.147	1.719
003	TAWANGMANGU	409.093.230	3.534
004	KALISORO	349.731.098	2.195
005	BLUMBANG	167.510.319	2.323
006	GONDOSULI	29.991.367	1.516
007	TENGLIK	34.627.711	1.880
008	NGLEBAK	73.869.824	2.007
009	KARANGLO	55.322.175	1.586
010	PLUMBON	56.860.140	2.351
		1.300.595.594	21.085

NGARGOYOSO			
NO	NAMA	NOMINAL	JUMLAH WP
001	PUNTUKREJO	32.851.835	1.506
002	BERJO	51.188.681	3.450
003	GIRIMULYO	42.250.334	2.368
004	SEGOROGUNUNG	13.062.622	1.124
005	KEMUNING	49.705.210	3.153
006	NGLEGOK	32.405.838	2.147
007	DUKUH	25.265.163	1.063
008	JATIREJO	20.926.744	1.349
009	NGARGOYOSO	33.147.140	2.539
		300.803.567	18.699

KARANGPANDAN			
NO	NAMA	NOMINAL	JUMLAH WP
001	BANGSRI	114.390.807	2.459
002	NGEMPLAK	75.259.297	2.094
003	DOPLANG	62.902.192	1.889
004	GERDU	83.741.455	2.191
005	KARANG	63.540.134	1.779
006	SALAM	63.943.468	1.831
007	KARANGPANDAN	197.901.133	2.313
008	TOHKUNING	92.321.484	2.502
009	GONDANGMANIS	47.750.981	1.364
010	DAYU	46.620.605	1.299
011	HARJOSARI	49.513.365	1.706
		897.884.921	21.427

KARANGANYAR			
NO	NAMA	NOMINAL	JUMLAH WP
001	LALUNG	164.692.523	3.174
002	BOLONG	99.973.355	1.556
003	JANTIHARJO	102.317.861	2.128
004	TEGALGEDE	381.107.361	3.554
005	JUNGKE	181.366.435	2.283
006	CANGAKAN	403.592.700	2.348
007	KARANGANYAR	263.606.615	1.125
008	BEJEN	430.265.072	4.708
009	POPONGAN	281.447.470	3.201
010	GAYAMDOMPO	183.359.596	2.121
011	DELINGAN	130.149.389	2.105

012	GEDONG	139.467.311	2.618
		2.761.345.688	30.921

TASIKMADU			
NO	NAMA	NOMINAL	JUMLAH WP
001	BURAN	93.538.743	1.811
002	PAPAHAN	343.015.637	3.267
003	NGIJO	225.537.816	3.121
004	GAUM	99.524.886	2.413
005	SURUH	79.926.517	2.232
006	PANDEYAN	106.925.509	1.806
007	KARANGMOJO	89.126.381	2.252
008	KALING	344.035.566	2.484
009	WONOLOPO	62.772.816	1.961
010	KALIJIRAK	50.506.894	2.346
		1.494.910.765	23.693

JATEN			
NO	NAMA	NOMINAL	JUMLAH WP
001	SURUHKALANG	176.052.947	2.235
002	JATI	224.929.737	2.744
003	JATEN	972.881.106	5.130
004	DAGEN	1.331.383.903	1.821
005	NGRINGO	1.617.454.900	7.603
006	JETIS	1.385.232.938	1.881
007	SROYO	633.608.384	3.368
008	BRUJUL	428.362.470	2.308
		6.769.906.385	27.090

COLOMADU			
NO	NAMA	NOMINAL	JUMLAH WP
001	NGASEM	319.298.368	2.286
002	BOLON	426.015.570	2.863
003	MALANGJIWAN	581.399.522	3.806
004	PAULAN	397.608.340	1.505
005	GAJAHAN	321.928.201	1.000
006	BLULUKAN	1.513.824.109	2.613
007	GAWANAN	340.258.906	2.703
008	GEDONGAN	356.088.598	3.715
009	TOHUDAN	448.501.642	2.391
010	BATURAN	762.718.447	3.843
011	KLODRAN	493.151.832	2.065

		5.960.793.535	28.790
--	--	---------------	--------

GONDANGREJO			
NO	NAMA	NOMINAL	JUMLAH WP
001	WONOREJO	596.632.849	6.105
002	PLESUNGAN	315.958.624	5.036
003	JATIKUWUNG	66.299.374	3.059
004	SELOKATON	253.079.782	3.654
005	BULUREJO	240.423.346	2.589
006	REJOSARI	68.319.330	1.964
007	JERUKSAWIT	101.676.670	2.342
008	KARANGTURI	46.370.106	1.833
009	KRAGAN	46.273.555	2.387
010	WONOSARI	54.854.511	2.161
011	DAYU	57.233.667	2.404
012	TUBAN	321.680.542	3.013
013	KRENDOWAHONO	46.674.940	2.717
		2.215.477.296	39.264

KEBAKKRAMAT			
NO	NAMA	NOMINAL	JUMLAH WP
001	KEMIRI	508.546.598	3.538
002	NANGSRI	284.086.203	2.274
003	MACANAN	68.248.553	2.485
004	ALASTUWO	97.873.504	2.864
005	BANJARHARJO	63.355.240	2.069
006	MALANGGATEN	79.496.466	2.287
007	KALIWULUH	191.592.391	4.445
008	PULOSARI	899.624.659	2.034
009	KEBAK	250.123.406	2.165
010	WARU	237.782.989	2.558
		2.680.730.009	26.719

MOJOGEDANG			
NO	NAMA	NOMINAL	JUMLAH WP
001	SEWUREJO	44.765.113	2.242
002	NGADIREJO	51.384.329	2.062
003	MOJOGEDANG	79.546.101	1.867
004	POJOK	49.883.512	2.265
005	MOJOROTO	26.593.275	1.077
006	KALIBOTO	52.130.790	2.910
007	BUNTAR	18.385.809	1.606

008	GEBYOK	33.329.646	2.938
009	GENTUNGAN	51.770.628	2.539
010	PENDEM	40.674.089	1.832
011	PERENG	59.457.810	2.092
012	MUNGGUR	83.509.563	2.649
013	KEDUNGJERUK	71.353.660	3.182
		662.784.325	29.261

KERJO			
NO	NAMA	NOMINAL	JUMLAH WP
001	KUTHO	45.599.558	2.196
002	TAMANSARI	34.414.755	1.511
003	GANTEN	27.803.592	1.120
004	GEMPOLAN	40.589.682	1.527
005	PLOSOREJO	25.519.257	1.470
006	KARANGREJO	45.553.374	2.222
007	KWADUNGAN	29.681.657	1.188
008	BOTOK	20.710.224	1.059
009	SUMBERREJO	38.218.686	1.618
010	TAWANGSARI	49.655.000	2.196
		357.745.785	16.107

JENAWI			
NO	NAMA	NOMINAL	JUMLAH WP
001	GUMENG	21.521.784	1.756
002	ANGGRASMANIS	9.952.671	1.577
003	JENAWI	16.246.251	1.676
004	TRENGGULI	20.921.415	1.964
005	SIDOMUKTI	26.058.687	2.016
006	BALONG	36.484.602	1.927
007	SELOROMO	39.771.184	2.304
008	MENJING	19.282.369	1.489
009	LEMPONG	36.889.490	2.457
		227.128.453	17.166

28.025.261.339

407.078

### Wawancara dengan pegawai DPPKAD Karanganyar

1. A: apa saja upaya DPPKAD dalam meningkatkan pajak bumi dan bangunan?  
B: pihak DPPKAD melakukan pendataan secara aktif dan pasif.
2. A: apa yang dimaksud pendataan aktif dan pasif itu?  
B: pendataan aktif yaitu pihak DPPKAD mendatangi wajib pajak PBB, sedangkan pendataan pasif yaitu wajib pajak yang mendatangi DPPKAD/pihak yang bersangkutan.
3. A: selain itu apalagi upayanya?  
B: mengadakan kegiatan jemput bola.
4. A: kegiatan jemput bola itu bagaimana?  
B: mendatangi wajib pajak guna mempermudah wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.
5. A: apakah ada lagi ?  
B: ada, dengan melakukan sosialisasi ke masing-masing desa dengan jadwal yang sudah direncanakan.
6. A: apakah ada reward yang diberikan DPPKAD kepada wajib pajak yang taat membayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu (sebelum jatuh tempo)?  
B: ada, setiap akhir tahun pihak DPPKAD melakukan undian pajak bumi dan bangunan dengan sistem komputerisasi dengan hadiah utama sepeda motor.



Agung Joko Wiyarso, S.STP, MM

Agung Joko Wiyarso, S.STP, MM